

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus wujud komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-based). Melalui kerangka tersebut, laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan digital.

Laporan ini memuat informasi mengenai tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta capaian kinerja utama Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis kinerja dan data dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna melakukan perbaikan berkelanjutan pada laporan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, 19 Januari 2026



Dr. Nusirwan S.Ag. M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi), sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025, Pusbang Ekosistem SDM Komdigi menetapkan tiga sasaran strategis utama yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia bidang komunikasi dan digital, yaitu peningkatan relevansi standar kompetensi dengan kebutuhan industri, peningkatan pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan nasional, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang bersih dan efisien.

Sasaran strategis pertama, **meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri**, diukur melalui indikator Persentase pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi. Sasaran strategis kedua, **meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional**, diukur melalui indikator Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi. Sasaran strategis ketiga, **meningkatnya kualitas tata kelola Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yang bersih dan efisien**, diukur melalui indikator Persentase batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK serta Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja organisasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya, guna mendukung terwujudnya SDM komunikasi dan digital yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing.

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

iv

Daftar Tabel

01-03

BAB 1 - Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	01
1.2	Dasar Hukum	01
1.3	Tugas dan Fungsi	01
1.4	Struktur Organisasi	02
1.5	Sumber Daya Manusia	03

04-08

BAB 2 - Perencanaan Kinerja

2.1	Rencana Strategis	04
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	04
2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	05

09-15

BAB 3 - Akuntabilitas Kinerja

3.1	Pengakuan dan Capaian Kinerja Tahun 2025	09
3.2	Analisis Capaian Kinerja	10
3.3	Capaian Kinerja Tahun 2024	13
3.4	Realisasi Anggaran	14

16-17

BAB 4 - Penutup

4.1	Kesimpulan	16
4.2	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	16

18-27

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025	09
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024	13
Tabel 3.1 Realisasi anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi	14

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran strategis dalam pengembangan ekosistem sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing di bidang komunikasi dan digital. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan perencanaan strategis dan memberikan hasil nyata bagi pemangku kepentingan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 berlandaskan pada:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Dokumen perencanaan Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital¹ mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem sumber daya manusia bidang komunikasi dan digital.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital menyelenggarakan fungsi:

¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

- 1 Penyusunan kebijakan teknis pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital;
- 2 Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital;
- 3 Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital;
- 4 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia

- 1 Subbagian Tata Usaha; dan
- 2 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Selain Subbagian Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital, Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital², Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi dibagi ke dalam 5 Tim Kerja antara lain:

- 1 Tim Pengelola Platform Ekosistem SDM Komdigi
- 2 Tim Pengembangan Konten dan Profesi Ekosistem SDM Komdigi
- 3 Tim Kajian Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi
- 4 Tim Pengelola Standar Kompetensi dan Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi
- 5 Tim Kerja Tata Usaha

² SK Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital

1.5 Sumber Daya Manusia

Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 55 orang pegawai. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, yang bersama-sama menjalankan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dari aspek status kepegawaian, sumber daya manusia Pusbang Ekosistem SDM Komdigi terdiri atas 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berperan sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan program. Selain itu, Pusbang Ekosistem SDM Komdigi juga didukung oleh 19 orang Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang memiliki kompetensi spesifik dan berkontribusi dalam penguatan substansi teknis, analisis data, serta dukungan operasional organisasi.



Komposisi sumber daya manusia tersebut mencerminkan upaya Pusbang Ekosistem SDM Komdigi dalam membangun organisasi yang adaptif dan profesional, dengan memadukan aparatur sipil negara dan tenaga pendukung yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital. Keberadaan SDM yang beragam dari sisi latar belakang dan fungsi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan digital. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi dan misi kementerian ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang terukur, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, transformasi digital, serta penguatan daya saing sumber daya manusia di bidang komunikasi dan digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan digital untuk tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- 1 Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
- 2 Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional;
- 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekosistem digital nasional;
- 4 Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;
- 5 Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric;
- 6 Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;
- 7 Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;
- 8 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- 9 Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien

Bagi Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi), Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam penetapan sasaran dan indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusbang Ekosistem SDM Komdigi dirumuskan dengan mengacu pada sasaran strategis kementerian, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen penugasan kinerja yang memuat komitmen pimpinan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai kesepakatan antara Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi), sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai acuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Pusbang Ekosistem SDM Komdigi. Melalui penetapan sasaran dan indikator kinerja yang terukur, Perjanjian Kinerja diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital.

Berikut Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri	Persentase (%) pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi	20%
2	Meningkatkan pemanfaatan data SDM digital dealam perencanaan dan kebijaksanaan dan kebijakan SDM digital nasional	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yang Bersih dan Efisien	1. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025	,1%
		2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025	70%

PROGRAM	ANGGARAN
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp 13.803.267.000
Total Anggaran	Rp 13.803.267.000

2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1 Persentase (%) pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komunikasi dan digital;

Indikator ini mengukur proporsi SKKNI yang termanfaatkan di dalam peta peta okupasi dan/atau KKNi, dan okupasi (di dalam peta okupasi) yang termanfaatkan menjadi skema sertifikasi atau skema sertifikasi nasional.

Adapun metode pengukuran dan formulasi perhitungan indikator tersebut adalah sebagai

$$R = \frac{A+B}{C+D} \times 100\%$$

Keterangan metode pengukuran:

R=Rasio pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi

A=Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Komdigi yang berstatus Berlaku yang digunakan di Peta Okupasi Nasional (PON) dan/atau KKNi bidang Komdigi yang berstatus Berlaku

B=Jumlah Okupasi Aktif Berkode Warna Hijau (artinya semua Tugas sudah berasal dari SKKNI/SKKN/SKKI) di PON bidang Komdigi yang berstatus Berlaku dan/atau berstatus Dicabut namun masih dalam masa penyesuaian penerapan okupasi, yang dijadikan Skema Sertifikasi atau Skema Sertifikasi Nasional

C=Jumlah Total SKKNI bidang Komdigi yang berstatus Berlaku

D=Jumlah Total Okupasi Aktif Berkode Warna Hijau (artinya semua Tugas sudah berasal dari SKKNI/SKKN/SKKI) di PON bidang Komdigi yang berstatus Berlaku dan/atau berstatus Dicabut namun masih dalam masa penyesuaian penerapan okupasi

- 2 Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi. Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital.

Adapun metode pengukuran dan formulasi perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu "**nilai rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan**". SKM terdiri dari 9 unsur pelayanan yaitu :

- Persyaratan;
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- Waktu Penyelesaian;
- Biaya Tarif;
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
- Sarana dan Prasarana

Formulasi Perhitungan

- Menghitung Bobot nilai rata tertimbang dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

- b. Menghitung nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbangan}$$

- c. Mengorvesikan nilai dasar terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 dengan rumus:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

- d. Melakukan kategorisasi nilai SKM yang diperoleh nilai SKM yang diperoleh sesuai ketentuan berikut:

**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (x)
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

- 3** Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025.

Indikator ini mengukur batas kewajaran atas material nilai temuan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini BPK Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024.

Adapun metode pengukuran dan formulasi perhitungan indikator tersebut adalah sebagai

$$\frac{\sum \text{Nilai temuan pengambalian ke kas negara LHP BPK atas LK Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024}}{\sum \text{Total realisasi anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024}} \times 100\%$$

- 4** Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025.

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LHP yang terbit pada tahun 2025.

Adapun metode pengukuran dan formulasi perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada Tahun 2025 di Badan Pengembangan SDM Komdigi adalah sebagai berikut :

**Total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada BPSDM Komdigi tahun 2025
(atas LHP yang terbit pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti** **X 100%**
**Total rekomendasi BPK RI pada BPSDM Komdigi 2025
(atas LHP yang terbit pada tahun 2025)**

- Mengecualikan *force majeure*, subjek, atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif efisien ekonomis;
- Memperhitungkan usulan Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL) sebagai penyelesaian administrasi
- Dapat menggunakan perhitungan melalui pemisahan penyelesaian administrasi dan penyelesaian nominal
- Memperhatikan peraturan/ketentuan terkait yang berlaku

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara terintegrasi melalui perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan pelaporan kinerja yang mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusbang Ekosistem SDM Komdigi menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang terukur dalam Perjanjian Kinerja serta memastikan keterkaitan antara capaian kinerja dan dukungan anggaran. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya penguatan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital.

3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, yang diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja dalam suatu periode tertentu.

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi tahun 2025:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025

SK.1 Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri			
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Persentase (%) pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi	20%	26.01%	130.05%
SK.2 Meningkatkan pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional			
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi	80.00 (Baik)	81.68 (Baik)	102.75%
SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yang Bersih dan Efisien			
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025	1%	1%	100%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025	70%	100%	142.86%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat di Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi sampai dengan bulan Desember 2025 telah tercapai dengan progress dari masing-masing indikator kinerja sedikitnya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi telah berjalan baik dan seluruh target dapat tercapai.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Persentase Pemanfaatan Standar Kompetensi dan Peta Okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi

Indikator ini mengukur proporsi SKKNI yang dimanfaatkan di dalam peta okupasi dan/atau KKNi, dan okupasi (di dalam peta okupasi) yang dimanfaatkan menjadi skema sertifikasi atau skema sertifikasi nasional. Adapun target tahun 2025 adalah sebesar 20% dengan realisasi tahun 2025 adalah sebesar 26,01% dengan rincian sebagai berikut:

$$R = \frac{A + B}{C + D} \times 100\% = \frac{44 + 195}{48 + 871} \times 100\% = 26.01\%$$

Keterangan capaian:

- A** = 44
- B** = 195
- C** = 48
- D** = 871

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi dalam mendukung pelatihan bidang komunikasi dan digital telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya integrasi standar kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan SDM Komdigi.

Faktor pendukung:

- 1 Ketersediaan SKKNI bidang Komdigi yang berlaku dan lengkap, serta bisa dipetakan ke dalam Peta Okupasi Nasional (PON) dan/atau diturunkan dalam KKNi.
- 2 Peningkatan penggunaan SKKNI yang berlaku pada buku Peta Okupasi Nasional (PON) bidang TIK, Komunikasi, dan Telekomunikasi.
- 3 Digitalisasi Peta Okupasi yang memudahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyusun skema sertifikasi yang valid.
- 4 Banyaknya lembaga pelatihan atau Lembaga Pendidikan yang mulai menggunakan Unit Kompetensi dari SKKNI dalam Menyusun kurikulum.

Faktor Penghambat:

- 1 Sebagian SKKNI berstatus Berlaku belum dimanfaatkan dalam PON dan/atau KKNi, sehingga pemanfaatannya masih rendah.
- 2 Okupasi dengan SKKNI berlaku belum digunakan untuk skema pada LSP.
- 3 Pemanfaatan SKKNI dan peta okupasi belum optimal karena masih terdapat SKKNI berstatus berlaku yang belum digunakan pada PON dan/atau KKNi. Hal ini mengakibatkan proporsi SKKNI yang digunakan lebih rendah jika dibandingkan dengan total SKKNI yang tersedia.
- 4 Kesenjangan antara SKKNI dan kebutuhan pelatihan terkini, yang menyebabkan SKKNI tersedia tetapi tidak digunakan.
- 5 Sosialisasi SKKNI dan Peta Okupasi Nasional yang kurang maksimal sehingga dalam membuat skema LSP belum merujuk pada Peta Okupasi Nasional.

Langkah/tindak lanjut yang diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala:

- 1 Meningkatkan pemanfaatan SKKNI dan okupasi yang tersedia dengan pemetaan SKKNI berstatus berlaku ke dalam PON dan/atau KKNi sehingga jumlah SKKNI yang termanfaatkan meningkat.
- 2 Melakukan pemetaan ulang tugas-tugas pada okupasi yang masih berwarna kuning/merah agar segera menjadi warna Hijau.
- 3 Melakukan koordinasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong okupasi aktif digunakan menjadi skema sertifikasi. Pemutakhiran dan harmonisasi standar kompetensi terus dilakukan agar relevan dengan kebutuhan pelatihan bidang Komdigi.

Rekomendasi:

- 1 Pemanfaatan SKKNI dan Peta Okupasi perlu dijadikan acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan bidang Komdigi. Setiap program pelatihan diharapkan secara langsung merujuk pada standar kompetensi dan okupasi yang telah ditetapkan.
- 2 Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan terhadap pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi, serta perlu penyusunan peta jalan peningkatan pemanfaatan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga tidak bisa dibandingkan capaian kerjanya dengan indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3.2.2 Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Data dan Informasi SDM Komdigi

Pelaksanaan SKM diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang menetapkan sembilan unsur utama penilaian kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi persyaratan, sistem dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Melalui pengukuran terhadap unsur-unsur tersebut, instansi pemerintah dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang prima, Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terhadap berbagai layanan yang diselenggarakan. Survei ini difokuskan pada empat jenis layanan yang diselenggarakan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yaitu: Layanan Fasilitas Penyusunan RSKKNI/SKKNI/Peta Okupasi Nasional, Layanan Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital, Layanan Data dan Informasi SDM Digital, dan Layanan Rekomendasi Pemberian Lisensi LSP.

Target nilai indikator ini pada tahun 2025 adalah 80.00 (kategori "Baik") dengan realisasi tahun 2025 adalah 81,68 (kategori "Baik").

Realisasi tingkat kepuasan pengguna yang mencapai nilai 81,68 (kategori "Baik") menunjukkan bahwa kualitas layanan data dan informasi SDM Komdigi telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pengguna. Hal ini menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan layanan yang responsif, akurat, dan mudah diakses.

Faktor Pendukung:

- 1 Adanya komitmen pimpinan dan kebijakan internal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2 Ketersediaan layanan pengembangan SDM komunikasi dan digital yang relevan dengan kebutuhan.
- 3 Pemanfaatan platform digital dalam penyampaian layanan yang memudahkan akses masyarakat.
- 4 Kompetensi dan sikap pelayanan petugas yang dinilai responsif dan informatif.
- 5 Prosedur layanan yang relatif jelas dan terdokumentasi.

Faktor Penghambat:

- 1 Koordinasi lintas satuan kerja yang masih perlu ditingkatkan.
- 2 Beban layanan yang meningkat pada periode tertentu sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan.

Langkah/Tindak Lanjut yang Diambil:

- 1 Melakukan evaluasi dan perbaikan alur proses layanan secara berkala.
- 2 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan layanan.
- 3 Melaksanakan sosialisasi dan penyediaan informasi layanan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Rekomendasi:

- 1 Mengembangkan media informasi dan panduan layanan yang lebih komprehensif dan *user-friendly*.
- 2 Memperluas kanal komunikasi dan pengaduan masyarakat.
- 3 Melakukan monitoring dan evaluasi hasil SKM secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.
- 4 Memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung pelayanan publik.

Indikator ini merupakan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga tidak bisa dibandingkan capaian kerjanya dengan indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3.2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai temuan pengembalian ke kas negara yang tercatat dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 dibandingkan dengan total realisasi anggaran BPSDM Komdigi TA 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat temuan di satuan kerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi dengan Nilai temuan pengembalian Pusbang Ekosistem SDM Komdigi 2024 sebesar 429.646.432 dan total realisasi anggaran Pusbang Ekosistem SDM Komdigi 2024 sebesar 20.059.311.000, sehingga Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025 : $429.646.432/20.059.311.000 \times 100\% = 0,0214\%$. Secara keseluruhan seluruh temuan ini telah selesai dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tidak terdapat temuan pada satuan kerja Puslitbang Aptika dan IKP. Oleh karena itu, persentase capaian kinerja atas indikator Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2024 tercatat nihil. Meskipun pada tahun 2025 terdapat temuan namun seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui pengembalian ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan respon cepat Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3.2.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan merupakan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun 2025 (atas LHP BPK yang keluar pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi BPK tahun 2025 (atas LHP yang keluar pada tahun 2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 atas LK 2024 terdapat 2 (dua) temuan berupa kelebihan belanja jasa lainnya dan belanja operasional lainnya, dengan rekomendasi penyelesaian dari BPK sebanyak 2 (dua) temuan.

Sampai dengan Desember 2025 rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti oleh Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi dan sudah sesuai adalah 2 (dua) temuan, sehingga Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi tahun 2025 = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tidak terdapat temuan pada satuan kerja Puslitbang Aptika dan IKP yang harus ditindaklanjuti.

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024.

Sasaran Kinerja 1: Meningkatkan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika			
Ondokator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja bidang Kominfo	5 Rancangan Standar	5 Rancangan Standar	100%
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Persentase (%) Pemrosesan Pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP	100%	100%	100%
Persentase (%) Keberlangsungan Layanan Platform SDM Digital Nasional	90%	99,25%	110,28%

Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang Dijadikan Referensi Penetapan Program Pengembangan SDM Digital di Provinsi	15%	15%	100%
Sasaran Kinerja 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Puslitbang Aptika dan IKP yang Bersih dan Efisien			
Ondokator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasi Pemeriksaan BK di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	1%	1% (Tidak ada temuan)	100%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Puslitbang APTIKA IKP Pada tahun 2024	70%	70% (Tidak ada temuan)	100%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Puslitbang APTIKA IKP pada tahun 2024	30%	30% (Tidak ada temuan)	100%
Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	40%	93,29%	233,23%
Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%	36,24%	120,80%

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) merupakan cerminan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut realisasi penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi tahun 2025:

Tabel 3.3 Realisasi anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi

Satuan Kerja	Pagu (RP)		Realisasi Anggaran	
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Rupiah	%
Pusbang Ekosistem SDM Komdigi	Rp 13.803.267.000	Rp 18.003.267.000	Rp 17.553.644.455	97.50%
Kegiatan	Pagu	Realisasi Akrual	%	
Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital (ABO)	Rp 5.677.993.000	Rp 5.556.822.391	97.87%	
Koordinasi Stakeholders Ekosistem SDM Digital (AEA)	Rp 333.658.000	Rp 314.388.382	94.22%	
Rancangan Standar Kompetensi Kerja dan Peta Okupasi Bidang Kominfo (AFA)	Rp 1.536.310.000	Rp 1.453.198.662	94.59%	
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (CCL)	Rp 1.740.826.000	Rp 1.693.856.322	97.30%	
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika (DTS) (SCA)	Rp 4.514.480.000	Rp 4.494.655.850	99.56%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Platform SDM Digital	Rp 4.200.000.000	Rp 4.040.722.648	96.21%	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi tahun 2025 sebesar Rp 18.003.267.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu Rp 17.553.644.455 atau sebesar 97,50%. Realisasi anggaran di bawah 100% dikarenakan adanya efisiensi pada proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa. Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi mengalami penurunan sebesar 1,62%, dimana pada tahun 2024 realisasi anggaran sebesar 99,12% sedangkan di tahun 2025 sebesar 97,50%.

Pada indikator Perjanjian Kinerja Persentase (%) Pemanfaatan Standar Kompetensi dan Peta Okupasi untuk Mendukung Pelatihan Bidang, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.536.310.000 dengan realisasi sebesar Rp1.453.198.662 atau mencapai 94,59%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi telah berjalan secara efektif dan optimal, dengan serapan anggaran yang tinggi serta tetap memperhatikan prinsip efisiensi. Sementara itu, untuk indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak dialokasikan anggaran secara khusus dalam struktur perencanaan. Pelaksanaannya dibebankan pada seluruh Rincian Output (RO) pada Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi, sehingga kebutuhan pembiayaan kegiatan SKM terintegrasi dalam dukungan operasional program tersebut. Hal ini dikarenakan survei ini difokuskan pada empat jenis layanan yang diselenggarakan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yaitu: Layanan Fasilitas Penyusunan RSKKNI/SKKNI/Peta Okupasi Nasional, Layanan Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital, Layanan Data dan Informasi SDM Digital, dan Layanan Rekomendasi Pemberian Lisensi LSP. Pendekatan ini mencerminkan upaya efisiensi dan integrasi perencanaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan capaian indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital telah berjalan dengan baik, ditunjukkan melalui keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- 2 Indikator persentase pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi berhasil mencapai realisasi sebesar 26,1%, melampaui target 20%, yang menunjukkan meningkatnya pemanfaatan standar kompetensi dalam mendukung pelatihan bidang komunikasi dan digital;
- 3 Indikator tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi mencapai nilai 81,68 dengan kategori "Baik", melampaui target nilai 80. Peningkatan kepuasan pengguna mencerminkan kualitas layanan yang semakin responsif dan sesuai dengan kebutuhan sehingga memperkuat kepercayaan publik;
- 4 Indikator persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025 mencapai realisasi 1% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5 Indikator Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025 mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 6 Indikator Secara keseluruhan, kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang efektif dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pada masa mendatang, capaian kinerja yang telah diraih bukan hanya perlu dipertahankan, tapi juga ditingkatkan kualitas dan dampaknya melalui penguatan inovasi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan standar kompetensi dan data SDM Komdigi. Melalui upaya-upaya strategis tersebut, diharapkan peran dan kontribusi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang komunikasi dan digital dapat semakin optimal, berdampak luas, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut disusun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (Pusbang Ekosistem SDM Komdigi). Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja, analisis permasalahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi pada periode berikutnya. Adapun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang masih perlu dilakukan oleh Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pemanfaatan Standar Kompetensi dan Peta Okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi, setiap perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan bidang komdigi direkomendasikan untuk merujuk pada standar kompetensi dan okupasi sebagai acuan utama. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan terhadap pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi, serta perlu penyusunan peta jalan peningkatan pemanfaatan.
2. Terkait dengan pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Data dan Informasi SDM Komdigi, direkomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil SKM secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan, memperkuat kapasitas SDM, dan infrastruktur pendukung pelayanan publik.
3. Sebagai upaya meminimalisir potensi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka direkomendasikan untuk memperkuat pengendalian internal dan melakukan reuiu internal secara berkala terhadap dokumen dan proses bisnis, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan pelaporan, serta untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal.

LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN EKOSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri	Persentase (%) pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi	20%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi	Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusbang Ekosistem SDM Komdigi yang Bersih dan Efisien	1. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Tahun 2025	<1%
		2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusbang Ekosistem SDM Komdigi pada Tahun 2025	70%

Program	Anggaran	
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp.	13.803.267.000
Total Anggaran	Rp.	13.803.267.000

Lampiran II Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kode & Nomenklatur Sasaran	SK.1 Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri
Kode & Nomenklatur Indikator Kinerja	IKSK.1.1 Persentase (%) pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi
Definisi Indikator Kinerja	Indikator ini mengukur proporsi SKKNI yang termanfaatkan di dalam peta okupasi dan/atau KKNI, dan okupasi (di dalam peta okupasi) yang termanfaatkan menjadi skema sertifikasi atau skema sertifikasi nasional.
Target	20
Capaian Tahun Sebelumnya (Baseline)	-
Satuan	Persentase
Tingkat Kendali Indikator Kinerja	Low
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	Proxy
Unit Organisasi	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital
Metode Pengukuran dan Formulasi Perhitungan	<p>R = Rasio pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi</p> <p>A = Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Komdigi yang berstatus Berlaku yang digunakan di Peta Okupasi Nasional (PON) dan/atau KKNI bidang Komdigi yang berstatus Berlaku</p> <p>B = Jumlah Okupasi Aktif Berkode Warna Hijau (artinya semua Tugas sudah berasal dari SKKNI/SKKN/SKKI) di PON bidang Komdigi yang berstatus Berlaku dan/atau berstatus Dicabut namun masih dalam masa penyesuaian penerapan okupasi, yang dijadikan Skema Sertifikasi atau Skema Sertifikasi Nasional</p> <p>C = Jumlah Total SKKNI bidang Komdigi yang berstatus Berlaku</p> <p>D = Jumlah Total Okupasi Aktif Berkode Warna Hijau (artinya semua Tugas sudah berasal dari SKKNI/SKKN/SKKI) di PON bidang Komdigi yang berstatus Berlaku dan/atau berstatus Dicabut namun masih dalam masa penyesuaian penerapan okupasi</p> $R = \frac{A + B}{C + D} \times 100\%$
Unit Penyedia Data	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital
Sumber Data	Laporan pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi
Waktu Ketersediaan Data	Desember 2025
Periode Pelaporan Capaian Kinerja	Tahunan
Link dengan RPJMN/RKP/RENSTRA	RPJMN (Tidak) RKP (Tidak) Renstra (Ya)
Polarisasi Capaian Kinerja	Maximize

Target Antara	Bulan	Rencana Aksi	Target Antara	% Bobot
	Januari	-	-	-
	Februari	-	-	-
	Maret	-	-	-
	April	-	-	-
	Mei	Identifikasi Pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi	Laporan Identifikasi	5
	Juni	Persiapan Penyusunan standar kompetensi dan peta okupasi	Laporan Persiapan	7
	Juli	Penyusunan standar kompetensi	Laporan Penyusunan	9
	Agustus	Pemutakhiran peta okupasi	Laporan Pemutakhiran	11
	September	Penyusunan skema sertifikasi nasional	Laporan Penyusunan	13
	Oktober	Verifikasi standar kompetensi, peta okupasi, dan skema sertifikasi nasional	Laporan Verifikasi	15
	November	Validasi standar kompetensi, peta okupasi, dan skema sertifikasi nasional	Laporan Validasi	17
	Desember	Sosialisasi standar kompetensi, peta okupasi, dan skema sertifikasi nasional	Laporan Sosialisasi	20
Perhitungan Target	Mendekati/Sama Persis			
Konsolidasi	Sama Persis			
Indikator Kinerja Di atasnya	IKSP 1.2 Persentase (%) peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital			

Kode & Nomenklatur Sasaran	SK.2 Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional
Kode & Nomenklatur Indikator Kinerja	IKSK 2.1 Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi
Definisi Indikator Kinerja	Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital.
Target	Baik
Capaian Tahun Sebelumnya (Baseline)	-
Satuan	Predikat
Tingkat Kendali Indikator Kinerja	High
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	Exact
Unit Organisasi	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital

<p>Metode Pengukuran dan Formulasi Perhitungan</p>	<p>Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu "nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan". SKM terdiri dari 9 unsur pelayanan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Sarana dan prasarana. <p>Formulasi perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Bobot nilai rata-rata tertimbang dengan rumus: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ </div> 2. Menghitung nilai rata-rata tertimbang dengan rumus: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> 3. Mengonversikan nilai dasar terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 dengan rumus: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$ </div> 4. Melakukan kategorisasi nilai SKM yang diperoleh sesuai ketentuan berikut: 																									
	<p style="text-align: center;">Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)																						
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																						
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																						
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																						
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																						
Unit Penyedia Data	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital																									
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi																									
Waktu Ketersediaan Data	Desember 2025																									

Periode Pelaporan Capaian Kinerja	Tahunan			
Link dengan RPJMN/RKP/RENSTRA	RPJMN (Tidak) RKP (Tidak) Renstra (Tidak)			
Polarisasi Capaian Kinerja	Maximize			
Target Antara				
	Bulan	Rencana Aksi	Target Antara	% Bobot
	Januari	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	5
	Februari	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	10
	Maret	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	15
	April	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	20
	Mei	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	25
	Juni	1. Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi 2. Penyusunan instrumen SKM dan persiapan pelaksanaan survei	Instrumen SKM	40
	Juli	1. Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi 2. Pelaksanaan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 1 Tahun 2025	Data Survei SKM Semester 1 Tahun 2025	45
	Agustus	1. Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi 2. Penyusunan Laporan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 1 Tahun 2025	Laporan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 1 Tahun 2025	65
	September	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	70
	Oktober	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan	75
		November	Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	Laporan layanan
	Desember	1. Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi 2. Pelaksanaan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 2 Tahun 2025 3. Penyusunan Laporan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 2 Tahun 2025	Laporan SKM Layanan Data dan Informasi Semester 2 Tahun 2025	100
Perhitungan Target	Sama Persis			
Konsolidasi	Sama Persis			
Indikator Kinerja Diatasnya	IKSP 1.2 Persentase (%) peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital			

Kode & Nomenklatur Sasaran	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital yang Bersih dan Efisien															
Kode & Nomenklatur Indikator Kinerja	IKSK 3.1 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025															
Definisi Indikator Kinerja	Indikator ini mengukur batas kewajaran atas material nilai temuan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini BPK Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024.															
Target	<1															
Capaian Tahun Sebelumnya (Baseline)	0															
Satuan	Persentase															
Tingkat Kendali Indikator Kinerja	Moderate															
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	Exact															
Unit Organisasi	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital															
Metode Pengukuran dan Formulasi Perhitungan	$\frac{\sum \text{Nilai temuan pengembalian ke kas negara LHP BPK atas LK Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024}}{\sum \text{Total realisasi anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024}} \times 100\%$															
Unit Penyedia Data	1. Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital; 2. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi															
Sumber Data	Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)															
Waktu Ketersediaan Data	Desember 2025															
Periode Pelaporan Capaian Kinerja	Tahunan															
Link dengan RPJMN/RKP/RENSTRA	RPJMN (Tidak) RKP (Tidak) Renstra (Ya)															
Polarisasi Capaian Kinerja	Minimize															
Target Antara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Rencana Aksi</th> <th>Target Antara</th> <th>% Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari</td> <td>Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)</td> <td>Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)</td> <td>Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Bulan	Rencana Aksi	Target Antara	% Bobot	Januari	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	5	Februari	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	10
Bulan	Rencana Aksi	Target Antara	% Bobot													
Januari	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	5													
Februari	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	10													

Maret	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	20
April	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	30
Mei	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	40
Juni	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	50
Juli	Koordinasi terkait timeline pelaksanaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi SIMWAS) dan Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Komdigi TA 2024 (Aplikasi OMSPAN)	Data dukung hasil koordinasi terkait timeline pemeriksaan BPK	60
Agustus	Pelaporan Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	1 Laporan Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	70
September	Pelaporan Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	1 Laporan Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	85
Oktober	Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	1 Dokumen Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	90
November	Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	1 Dokumen Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	95
Desember	Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi	1 Dokumen Evaluasi Data Hasil Pemeriksaan	100

			BPK di BPSDM Kemdigi	
Perhitungan Target	Sama Persis			
Konsolidasi	Akumulasi			
Indikator Kinerja Diatasnya	IKSP 5.1 Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di BPSDM Komdigi Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025			
Kode & Nomenklatur Sasaran	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital yang Bersih dan Efisien			
Kode & Nomenklatur Indikator Kinerja	IKSK 3.2 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital pada Tahun 2025			
Definisi Indikator Kinerja	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LHP yang terbit pada tahun 2025			
Target	70			
Capaian Tahun Sebelumnya (Baseline)	100			
Satuan	Persentase			
Tingkat Kendali Indikator Kinerja	Moderate			
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	Exact			
Unit Organisasi	Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital			
Metode Pengukuran dan Formulasi Perhitungan	<p>Rumus Perhitungan Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada Tahun 2025 di Badan Pengembangan SDM Komdigi adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada BPSDM Komdigi tahun 2025 (atas LHP yang terbit pada tahun 2025) yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK RI pada BPSDM Komdigi 2025 (atas LHP yang terbit pada tahun 2025)}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Mengecualikan force majeure, subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif efisien ekonomis; - Memperhitungkan usulan Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL) sebagai penyelesaian administrasi; - Dapat menggunakan perhitungan melalui pemisahan penyelesaian administrasi dan penyelesaian nominal; - Memperhatikan peraturan/ketentuan terkait yang berlaku 			
Unit Penyedia Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital; 2. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi 			
Sumber Data	Laporan Pemantauan TLHP (apabila sampai dengan batas waktu penerbitan LAKIP Ijzen belum diterbitkan laporan BPK, maka menggunakan laporan APIP)			
Waktu Ketersediaan Data	Desember 2025			
Periode Pelaporan Capaian Kinerja	Tahunan			
Link dengan RPJMN/RKP/RENSTRA	RPJMN (Tidak) RKP (Tidak) Renstra (Ya)			
Polarisasi Capaian Kinerja	Maximize			

Target Antara			
Bulan	Rencana Aksi	Target Antara	% Bobot
Januari	Pengadministrasian Bahan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pengadministrasian Bahan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	20
Februari	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	25
Maret	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	30
April	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	35
Mei	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	40
Juni	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	45
Juli	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	50
Agustus	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di	55

			Badan Pengembangan SDM Komdigi	
September	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi		60
Oktober	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi		65
November	Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Dokumen Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi		70
Desember	Penyusunan Laporan Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Badan Pengembangan SDM Komdigi	1 Laporan Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi		100
Perhitungan Target	Sama Persis			
Konsolidasi	Akumulasi			
Indikator Kinerja Diatasnya	IKSP 5.1 Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di BPSDM Komdigi Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025			